

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohim
NIM : 232611220
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa naskah Tesis yang berjudul **NIKAH MUT'AH MENURUT SUNNI DAN SYI'AH DALAM PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor)**, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari Tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, September 2025
Saya yang menyatakan



Rohim

NIM: 232611220

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **NIKAH MUT'AH MENURUT SUNNI DAN SYI'AH DALAM PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor Jawa Barat)**

Nama : ROHIM

NIM : 232611220

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Tanggal Ujian Tesis : 03 Oktober 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Serang 03 Oktober 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Wasehudin, M.Si.
NIP. 197012172008011008

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS







Tesis Berjudul : **NIKAH MUT'AH MENURUT SUNNI DAN SYI'AH DALAM PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor Jawa Barat)**

Nama : ROHIM

NIM : 232611220

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

diuji dan dinyatakan lulus oleh:

| TIM PENGUJI | | | | |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------|---|
| No | Jabatan | Nama | Tanggal | Tanda Tangan |
| 1 | Ketua Penguji | Prof. Dr. H. Itang, M.Ag. | 09-10-25 |  |
| 2 | Sekretaris | Dr. Ahmad Habibi Syahid, M.A.Pd. | 10-10-25 |  |
| 3 | Penguji I | Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.H. | 10-10-25 |  |
| 4 | Penguji II | Dr. H. Dede Permana, M.A. | 09-10-25 |  |
| 5 | Pembimbing I | Dr. Ahmad Zaini, M.Si. | 09-10-25 |  |
| 6 | Pembimbing II | Dr. Sayehu, M.Kom. | 09-10-25 |  |

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program
Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
di Serang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul : **NIKAH MUT'AH MENURUT SUNNI DAN SYIAH DALAM PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor)**, yang ditulis oleh :

Nama : ROHIM
NIM : 232611220
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Kami telah bersepakat bahwa Tesis Magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS dalam rangka memperoleh gelar M.H (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum wr.wb

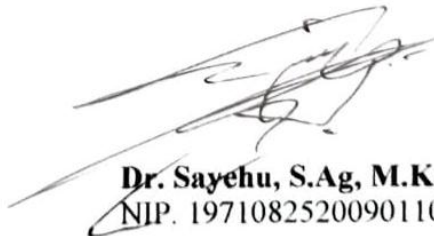
Serang, 23 September 2025

Pembimbing I



Dr. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II



Dr. Sayehu, S.Ag, M.Kom
NIP. 197108252009011005

PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahman nirrahim dengan menyebut nama Allah.
Alhamdulillah atas iziNya Tesis ini telah selesai. Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ibu Riyati bin Rakiman tercinta dan bapak Marsidi bin H.Kamad Sidik yang saya sayangi dan menjadi orang yang paling saya banggakan karena Allah SWT, mereka adalah sosok yang begitu berarti dalam hidup saya, yang memiliki kasih sayang yang begitu luas yang tak akan pernah terganti, pemilik nasehat dan dekapan yang paling indah, serta pemilik pintu maaf yang tak pernah tertutup. Kepada adikku Adinda Imat dan Adinda Rizki yang sesalu menyupport dan mendukung baik moral dan material. Terima kasih untuk kalian atas segala do'a nya dan kasih sayang serta pengorbanan yang tulus.*

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir.

(Qs Ar-Rum (30): 21)

ABSTRAK

ROHIM, NIM. 232611220, NIKAH MUT'AH MENURUT SUNNI DAN SYI'AH DALAM PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor), Pembimbing I, Dr. Ahmad Zaini, M.Si, dan Pembimbing II, Dr. Sayehu, M.Kom.

Nikah mut'ah adalah pernikahan kontrak yang disepakati antara pria dan wanita dengan jangka waktu tertentu, di mana kedua belah pihak menentukan mahar dan durasi kontrak tersebut, secara terminology nikah mut'ah berarti pernikahan kesenangan atau kenikmatan karena tujuan utamanya adalah untuk kesenangan seksual semata, bukan untuk membangun keluarga jangka panjang. Dalam praktiknya di masyarakat, terdapat kesenjangan pemahaman dan implementasi antara ketetapan hukum Islam sunni dan syi'ah yang dilihat dari segi Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (yaitu tentang nikah mut'ah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan tinjauan kedua sistem hukum tersebut serta implementasinya di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor Jawa Barat yang masih memperaktikan tentang nikah mut'ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, Penghulu/Tokoh Agama Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, serta pasangan yang melakukan/memperaktikan nikah mut'ah Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap literatur fiqh, peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara substantif, baik hukum Islam (KHI Pasal 119) maupun hukum positif memiliki kesamaan dalam mendefinisikan nikah mut'ah, yaitu pernikahan kontrak yang disepakati antara pria dan wanita dengan jangka waktu tertentu, di mana kedua belah pihak menentukan mahar dan durasi kontrak tersebut. 2) Dalam implementasinya, terdapat perbedaan fokus. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur nikah mut'ah karena praktik tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam di Indonesia, yang mayoritas menganut mazhab Sunni, dan pandangan hukum positif Indonesia-pun nikah mut'ah (atau kawin kontrak) tidak diakui juga karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernikahan ini juga dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkannya 3) Faktor kesenjangan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum nikah mut'ah, lemahnya koordinasi dan integrasi data dari pemerintah, serta adanya tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong pasangan untuk nikah mut'ah secara diam-diam.

Kata Kunci : Nikah mut'ah, Sunni dan Syi'ah, Kompilasi Hukum Islam(KHI), Hukum Positif di Indonesia

ABSTRACT

Rohim, Student ID Number 232611220, NIKAH MUT'AH ACCORDING TO SUNNI AND SHI'A FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA (Case Study in Tugu Selatan Village, Puncak Cisarua, Bogor), Supervisor I, Dr. Ahmad Zaini, M.Si, and Supervisor II, Dr. Sayehu, M.Kom.

Nikah mut'ah is a contractual marriage agreed upon between a man and a woman for a specific period of time, where both parties determine the dowry and duration of the contract. Terminologically, nikah mut'ah means a marriage of convenience or enjoyment because its primary purpose is purely for sexual pleasure, not for establishing a long-term family. In practice, there is a gap in understanding and implementation between the provisions of Sunni and Shi'a Islamic law, as viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law and positive law in Indonesia (specifically regarding nikah mut'ah). This study aims to analyze the similarities and differences between the two legal systems and their implementation in Tugu Selatan Village, Puncak Cisarua, Bogor, West Java, which still practices mut'ah marriage.

This study employed empirical field research with a qualitative approach. Primary data was collected through in-depth interviews with the Village Head and officials of Tugu Selatan Village, Cisarua, Bogor, the Village Head/Religious Leader of Tugu Selatan Village, Cisarua, Bogor, and couples who performed mut'ah marriages in Tugu Selatan Village, Cisarua, Bogor. Secondary data was obtained from a literature review of fiqh literature and laws and regulations. The collected data were analyzed descriptively and analytically.

The results show that: 1) Substantively, both Islamic law (Article 119 of the Compilation of Islamic Law) and positive law share a similar definition of mut'ah marriage, namely, a contractual marriage agreed upon between a man and a woman for a specific period, where both parties determine the dowry and duration of the contract. 2) In its implementation, there are differences in focus. The Compilation of Islamic Law (KHI) does not regulate temporary marriage (mut'ah marriage) because the practice is considered invalid under Islamic law in Indonesia, which is predominantly Sunni. Furthermore, according to Indonesian positive law, temporary marriage (mut'ah marriage) is also not recognized because it contradicts the purposes of marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). This marriage is also considered contrary to Islamic teachings and the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) prohibiting it. 3) The main factors contributing to this gap include low public understanding of the legal consequences of temporary marriage (mut'ah marriage), weak government coordination and data integration, and social and economic pressures that encourage couples to engage in secret temporary marriage (mut'ah marriage).

Keywords : Temporary Marriage, Sunni and Shia, Compilation of Islamic Law (KHI), Law Positive in Indonesia

ملخص

رحيم، رقم هوية الطالب ٢٣٢٦١١٢٢٠، نكاح المتعة بين السنة والشريعة من منظور تجميع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا (دراسة حالة في قرية توغو سيلاتان، بونشاك سيساروا، بوغور)، المشرف الأول، الدكتور أحمد زيني، ماجستير في الشريعة الإسلامية، والمشرف الثاني، الدكتور سايهو، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

نكاح المتعة هو زواج تعاقدى متفق عليه بين رجل وامرأة لمدة محددة، حيث يحدد الطرفان المهر ومدة العقد. اصطلاحًا، يعني نكاح المتعة زواج المصلحة أو المتعة لأن غرضه الأساسي هو المتعة الجنسية فقط، وليس تأسيس أسرة دائمة. عمليًا، ثمة فجوة في فهم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السنية والشيعية، من منظور تجميع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا (وتحديدًا فيما يتعلق بنكاح المتعة). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين القانونيين وتطبيقهما في قرية توغو سيلاتان، بونشاك سيساروا، بوغور، جاوة الغربية، التي لا تزال تمارس زواج المتعة.

اعتمدت هذه الدراسة على البحث الميداني التجريبي بمنهج نوعي. جمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات معمقة مع رئيس القرية ومسؤوليها، ورئيسها/زعيمها الديني، والأزواج الذين عقدوا عقود زواج المتعة في القرية. أما البيانات الثانوية، فقد تم الحصول عليها من مراجعة الأدبيات الفقهية والقوانين واللوائح. وحُلَّت البيانات المجمعة وصفيًا وتحليليًا.

تظهر النتائج أن: (١) من الناحية الموضوعية، يشترك كل من الشريعة الإسلامية (المادة ١١٩ من مجموعة الشريعة الإسلامية) والقانون الوضعي في تعريف مماثل لزواج المتعة، أي زواج تعاقدى متفق عليه بين رجل وامرأة لفترة محددة، حيث يحدد الطرفان المهر ومدة العقد. (٢) في تطبيقه، هناك اختلافات في التركيز. لا تنظم مجموعة الشريعة الإسلامية الزواج المؤقت (زواج المتعة) لأن الممارسة تعتبر غير صالحة بموجب الشريعة الإسلامية في إندونيسيا، وهي في الغالب سنة. علاوة على ذلك، وفقًا للقانون الوضعي الإندونيسي، لا يُعترف أيضًا بالزواج المؤقت (زواج المتعة) لأنه يتعارض مع مقاصد الزواج المنصوص عليها في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ ومجموعة الشريعة الإسلامية. كما يُعتبر هذا الزواج مخالفًا للتعاليم الإسلامية وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي التي تحظره. (٣) تشمل العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الفجوة ضعف فهم الجمهور للعواقب القانونية للزواج المؤقت (زواج المتعة)، وضعف التنسيق الحكومي وتكامل البيانات، والضغط الاجتماعي والاقتصادية التي تُشجع الأزواج على الزواج المؤقت السري (زواج المتعة).

الكلمات المفتاحية: الزواج المؤقت، السنة والشريعة، تجميع الشريعة الإسلامية، القانون إيجابي في إندونيسيا

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Konsonan

| No | Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|-----|------|-----------|------|-----------|
| 1. | ا | | ط | t |
| 2. | ب | B | ظ | z |
| 3. | ت | T | ع | |
| 4. | ث | Th | غ | Gh |
| 5. | ج | J | ف | F |
| 6. | ح | h | ق | Q |
| 7. | خ | kh | ك | K |
| 8. | د | D | ل | L |
| 9. | ذ | dh | م | M |
| 10. | ر | R | ن | N |
| 11. | ز | Z | و | W |
| 12. | س | S | ه | H |
| 13. | ش | Sh | ء | |
| 14. | ص | s | ي | Y |
| 15. | ض | d | | |

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writer of Term Paper, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia |
|----------------------|---------------|-----------|
| ◻ | <i>fathah</i> | A |
| ◻ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◻ | <i>ḍammah</i> | U |

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtidâ* (اقتضاء)

Vokal Rangkap (diftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia | Keterangan |
|----------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| ي◻ | <i>fathah</i> dan <i>ya</i> | Ay | a dan y |
| و◻ | <i>fathah</i> dan <i>wawu</i> | Aw | a dan w |

Contoh : *alayh* (عليه)

: *mawḍû* (موضوع)

Vokal Panjang (*mad*)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia | Keterangan |
|----------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| ا◻ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | Â | a dan garis di atas |
| ي◻ | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i> | Î | i dan garis di atas |
| و◻ | <i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i> | Û | u dan garis di atas |

Contoh : *al-jamâah* (الجماعة)
: *ghalîzan* (غليظا)
: *yadûru* (يدور)

Tâ Marbûṭah

Transliterasi untuk tâ marbûṭah ada dua:

Jika hidup, (menjadi *mudâf*) transliterasinya adalah *t*.

Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharîat al-islâm* (شريعة الاسلام)
: *al-baqarah* (البقرة)

Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **NIKAH MUT'AH MENURUT SUNNI DAN SYI'AH DALAM PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor)**, Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan Tesis pada program Strata-2 di Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari dalam penyusunan Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. KH. Muhammad Ishom, MA;
2. Direktur Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. Wasehudin, M. Si atas bimbingan dan arahnya;
3. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. Hj. Umdatul Hasannah, M.Hum, atas bimbingan dan arahnya;

4. Ketua Prodi S2 Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr., M.Si yang sudah memberikan arahan dan Sekretaris Prodi S2 Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu administrasi prodi S2;
5. Pembimbing I, Dr. Ahmad zaini, M.Si dan pembimbing II Dr. Sayehu, M.Kom yang terus selalu membimbing Tesis ini dengan penuh ikhlas dan sabar sehingga Tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Staf Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Kepada Keluarga terutama kedua orang tua tercinta, bapak Marsidi dan Ibu Riyanti pemilik nasehat dan dekapan yang paling indah, serta adik-adik saya yaitu saudara Imat dan Rizki yang sesalu menyupport dan mendukung baik moral dan material. Terima kasih untuk kalian atas segala do'a, kasih sayang pengorbanan yang tulus.
8. Rekan-rekan yang telah membantu dalam menyusun Tesis ini, seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Islam/HKI angkatan 2023 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, semoga silaturahmi kita terus terjalin.

Saran dan keritik bagi para pembaca merupakan sebuah apresiasi untuk penulis, karena penulis menyadari betul dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun dari metodologi ataupun penulisannya

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan

segala kelemahan dan kekurangan, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amiin.....

Serang, September 2025

Penyusun,

Rohim

NIM: 232611220

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | i |
| LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING UJIAN TESIS | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vii |
| ABSTRAK | vii |
| TRANSLITERASI | x |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 15 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Penelitian Terdahulu | 17 |
| F. Kerangka Pemikiran | 21 |
| G. Metode Penelitian | 28 |
| H. Sistem Pembahasan | 32 |
| BAB II TEORITIS DAN NORMATIF TENTANG NIKAH MUT'AH MENRUT KHI DAN HUKUM POSITIF INDONEKSIA | |
| A. Pengertian Nikah Mut'ah | 34 |
| 1. Menurut Bahasa dan Istilah | 41 |
| 2. Dasar Hak dan Dalil Nikah Mut'ah (al-Qur'an, Hadis dan Pandangan Ulama) | 51 |
| 3. Tinjauan dan Ciri-Ciri Nikah Mut'ah | 62 |
| B. Sejarah dan Perkembangan Nikah Mut'ah Dalam Nisam | 66 |
| 1. Peraktik Nikah Mut'ah di Masa Nabi dan Sahabat | 72 |
| 2. Pandangan Mazhab Sunni dan Syi'ah Terhadap Nikah Mut'ah | 73 |
| 3. Kontroversi dan Perkembangan Nikah Mut'ah | 97 |
| C. Pandangan KHI Tentang Nikah Mut'ah | 117 |
| 1. Landasan Filosofis dan Yuridis KHI | 122 |
| 2. Ketentuan Perkawinan | 124 |
| 3. Pandangan Terhadap Nikah Mutah Dalam KHI | 125 |
| 4. Implikasi Hukum Terhadap Nikah Yang Tidak Sesuai KHI | 127 |

| | | |
|--|--|-----|
| D. | Pandangan Hukum Positif Nikah Mut'ah | 130 |
| 1. | Hukum Perkawinan Dalam UU No. 01 Tahun 197 | 132 |
| 2. | Ketentuan Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Nasional | 145 |
| 3. | Analisis Yuridis Terhadap Nikah Mut'ah Dalam Persepektif Hukum Positif | 147 |
| 4. | Studi Petugas Pengadilan Terhadap Nikah Mut'ah | 148 |
| E. | Perbandingan Antara KHI Dan Hukum Positif Dalam Menyikapi Nikah Mut'ah..... | 151 |
| 1. | Titik Persamaan dan Perbedaan | 155 |
| 2. | Dampak Sosial Hukum Terhadap Peraktik Nikah Mut'ah di Indonesia | 157 |
| BAB III GAMBARAN DESA TUGU SELATAN PUNCAK CISARUA BOGOR | | |
| A. | Gambaran Umum Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor | 160 |
| 1. | Letak Geografis Dan Kondisi Sosial..... | 192 |
| 2. | Keadaan Keagamaan Dan Adat Istida Masyarakat | 229 |
| 3. | Metode Observasi Lapangan..... | 231 |
| 4. | Dokumentasi dan Analisis Yuridis | 235 |
| 5. | Deskripsi Data Lapangan | 239 |
| 6. | Keadaan Lapangan dan Adata Istiadat Masyarakat | 241 |
| 7. | Fenomena Nikah Mut'ah di Desa Tugu Selatan | 249 |
| B. | Studi Kasus Nikah Mut'ah di Desa Tugu Selatan..... | 257 |
| 1. | Profil Kasus Nikah Mut'ah di Desa Tugu Selatan..... | 258 |
| 2. | Motif Atau Latar Belakang Nikah Mut'ah..... | 262 |
| 3. | Persepsi Masyarakat Setempat Terhadap Nikah Mut'ah..... | 266 |
| 4. | Tanggapan Aparatur Desa, Tokoh Agama Dan KUA Setempat | 267 |
| C. | Analisis Yuridi Dan Sosialogis | 270 |
| 1. | Analisis Nikah Mut'ah Berdasarkan Hukum Islam | 272 |
| 2. | Analisis Nikah Mut'ah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia..... | 274 |
| 3. | Analisis Dampak Sosial Dan Hukum di Masyarakat..... | 277 |
| 4. | Korelasi Antara Pernikahan Agama dan Peraturan Nikah Mut'ah | 279 |
| D. | Evaluasi Dan Sosial | 282 |
| 1. | Evaluasi Terhadap Penegak Hukum Dan Pengawas Peraktik Nikah Mut'ah | 283 |

| | |
|---|-----|
| 2. Upaya Edukasi Dan Dakwah Terhadap Masyarakat Lokal | 285 |
| 3. Rekomendasi Kebijakan Dan Peran Pemerintah Dan Ormas Islam | 288 |
| BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA | |
| A. Nikah Mut'ah Menurut Sunni dan Syi'ah Dalam Persepektif HKI dan Hukum Positif Indonesia..... | 292 |
| 1. Gambaran Peraktik Nikah Mut'ah | 301 |
| 2. Wawancara Dengan Tokoh Agama, Pelaku Dan Masyarakat | 309 |
| 3. Peraktik Nikah Mut'ah di Desa Tugu Selatan | 328 |
| 4. Identitas para Nikah Mut'ah (Kewarganegaraan dan Status)..... | 333 |
| 5. Pola Prosedur Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Lapangan | 340 |
| 6. Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Nikah Mut'ah | 344 |
| 7. Fakta dan Kenyataan Nikah Mut'ah | 354 |
| B. Pandangan Masyarakat Cisarua Bogor Tentang Peraktik Nikah Mut'ah..... | 360 |
| 1. Persepsi Tokoh Agama Sunni Dan Syi'ah | 361 |
| 2. Pandangan Aparatur Desa Dan KUA Cisarua Bogor | 376 |
| 3. Respon Masyarakat Umum Terhadap Fenomena Nikah Mut'ah | 379 |
| 4. Isu Sosial Dan Stigma Terhadap Perempuan Pelaku Nikah Mut'ah | 383 |
| C. Analisis Data Dalam Setiap Hukum Islam..... | 385 |
| 1. Perilaku Terhadap Peraktik Nikah Mut'ah Berdasarkan Mazhab Sunni | 392 |
| 2. Keselarasan atau Definisi Peraktik Lapangan dengan Madzhab Syi'ah | 400 |
| 3. Implikasi Fiqih: Status Istri, Anak dan Waris | 408 |
| D. Analisis Data Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia | 411 |
| 1. Status Hukum Praktik Nikah Mut'ah Menurut UU No. Tahun 1974..... | 415 |
| 2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nikah Mut'ah | 419 |
| 3. Peluang dan Keadilan Penegakan Hukum Tentang Nikah Mut'ah | 425 |

| | |
|---|------------|
| 4. Status Perempuan dan Anak Hasil Nikah Mut'ah dalam Sipil dan Hukum Waris | 428 |
| E. Kolerasi Antara Penomena Sosial Dalam Pemahaman Hukum | 437 |
| 1. Fakta Sosial Ekonomi dan Agama Sebagai Pemicu Nikah Mut'ah..... | 443 |
| 2. Keterbatasan Peran Hukum Oleh Masyarakat Lokal | 456 |
| 3. Faktor Wanita Melakukan Kawin Kontrak | 458 |
| 4. Korelasi dengan kegiatan pariwisata Mobilitas Pendetang | 463 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 468 |
| B. Saran..... | 469 |
| DAFTAR PUSTAKA | 472 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 491 |